

MAKNA STRATEGIS PENDIDIKAN UNGGUL DALAM MEMACU AKSELERASI PEMBANGUNAN BANGSA

Oleh:
Arif Rohman
(FIP IKIP Yogyakarta)

Abstrak

Pendidikan merupakan instrumen strategis untuk menyiapkan ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas di berbagai bidang profesi dan keahlian. Ketersediaan sumberdaya manusia ini penting dalam rangka memacu akselerasi pembangunan bangsa, lebih-lebih untuk menyongsong era pasar bebas tahun 2003 di kawasan regional (ASEAN) dan tahun 2020 di tingkat mondial (Asia-Pasifik) agar kita dapat menjadi pemenang (*the winner*).

Sumberdaya manusia yang dibutuhkan tersebut idealnya adalah sumberdaya manusia yang unggul-kompetitif, yakni unggul secara internal dan eksternal. Unggul secara internal ditandai dengan adanya: (a) kualitas pribadi seperti keuletan, ketangguban, kemandirian, dan ketekunan, (b) kualitas penguasaan iptek, dan (c) kualitas moral serta keimanan. Sedang unggul secara eksternal merujuk pada: (a) produktivitas kerja, (b) disiplin kerja, (c) kemampuan korespondensi dan kerja kolektif, serta (d) kemampuan menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat.

Oleh karena adanya desakan akan kebutuhan tersebut, maka muncul kebijakan pendidikan unggul (*excellent*) yang mengemban tugas melahirkan tenaga-tenaga yang diharapkan. Namun pada dataran riil, pelaksanaan pendidikan unggul khususnya sekolah unggul di tingkat menengah yang ada masih mengalami distorsi aplikasi dan pemaknaan. Karenanya, komitmen yang sungguh-sungguh untuk membangun pendidikan dalam rangka memacu akselerasi pembangunan bangsa, lebih dituntut lagi.

Pendahuluan

Sudah menjadi komitmen bersama bahwa dalam rangka menyongsong era pasar bebas tahun 2003 di kawasan regional (ASEAN) dan tahun 2020 di tingkat mondial (Asia-Pasifik), maka bangsa Indonesia dituntut memiliki bekal sejumlah sumberdaya manusia yang berkualitas di berbagai bidang profesi dan keahlian. Para ahli memprediksikan, bahwa pada era tersebut masing-masing bangsa akan berkompetisi secara ketat agar bisa menjadi pemenang (*the winner*). Dengan pengertian, menang sebagai bangsa yang unggul dalam hal kualitas dan kuantitas segala produknya baik ekonomi, budaya, maupun Iptek. Karena itu ikhtiar untuk mempersiapkan bekal diri berupa keunggulan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan (*conditio sine qua non*).

Untuk menyiapkan rakyat Indonesia agar memiliki kualitas sumberdaya yang handal, tentu saja tidaklah mudah. Seperti sekarang ini saja, bangsa Indonesia masih punya beban bahwa puluhan juta anak-anak

belum sepenuhnya bisa mengenyam pendidikan baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Kondisi ini tentu saja berimplikasi pada rendahnya mutu angkatan kerja, yang pada gilirannya berakibat pada rendahnya pula produktivitas kerja mereka. Menurut Budiono (1992: 28) pada akhir tahun 1980-an jumlah tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan dasar hanya sebesar 34%, yang berpendidikan menengah sebesar 11%, sedang sisanya 2% lulusan perguruan tinggi dan 53% lainnya tidak berpendidikan.

Satu sisi dari ukuran kualitas pada iptek. Asumsi yang mendasarinya adalah semakin tinggi penguasaan ipteknya, semakin tinggi pula kemampuan daya saing angkatan kerja tersebut. Pada sisi penguasaan iptek ini, menurut BJ. Habibie (dalam Wisnuhardhana, 1996: 45) kita masih harus bekerja sangat keras untuk mengejar ketinggalan. Rakyat Indonesia yang sudah menguasai iptek masih bisa dihitung dengan jari. Beliau mengandaikan kalau ada 1% saja dari rakyat Indonesia yang bisa menguasai iptek, maka bangsa Indonesia akan bisa tumbuh menjadi negara industri dan dapat disejajarkan dengan negara-negara maju. Namun kenyataannya belumlah demikian, sehingga dengan berbekal pada kondisi yang ada ini, kita menjadi maklum bahwa menurut banyak ahli, Indonesia masih berada pada peringkat 15 di antara negara-negara di dunia dalam hal kemampuan kompetitifnya.

Dari kenyataan tersebut, bila dihadapkan dengan tantangan masa depan yang ditandai dengan iklim kompetisi yang sangat ketat, tak pelak lagi bahwa satu-satunya jalan yang paling efektif bagi bangsa Indonesia adalah mempersiapkan generasi baru yang memiliki keunggulan. Menurut Noeng Muhadjir (1995: 9) paling tidak dibutuhkan suatu model pendidikan yang secara efektif mampu melahirkan tipologi manusia yang diharapkan, yaitu model pendidikan yang mampu mengemban tugas mengejar keahlian yang disyaratkan dalam kompetisi global.

Dari sini pertanyaan yang muncul adalah: Model pendidikan yang bagaimana yang mampu mengemban tugas mempersiapkan generasi Indonesia agar memiliki sumberdaya yang bisa berkompetisi di era global? Lebih lanjut, mungkinkah hal itu bisa dilakukan, mengingat tingginya tingkat heterogenitas anak-anak Indonesia dalam hal potensi individual, watak, kultur, maupun kondisi geografisnya di satu sisi; sedang di sisi lain terjadi kesenjangan antara kemampuan negara yang masih terbatas dengan beban atas besarnya rakyat yang harus disantuni negara?

Pendidikan sebagai Instrumen Pembangunan

Pada dekade setelah Perang Dunia kedua, hampir semua bangsa di dunia memberikan penekanan pada dunia pendidikan sebagai salah satu

instrumen vital dalam pembangunan. Pendidikan dirasa mampu memberikan upaya pemeliharaan dan pendayagunaan sumberdaya manusia (*preservation of human resources*) secara efektif dalam rangka menata kembali struktur ekonomi dan politik yang telah terpuruk pada masa perang. Jepang dan Jerman adalah contoh dua negara yang mampu membangun kembali kerusakan akibat perang dunia dengan mendasarkan pada kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki.

Salah seorang tokoh Amerika yang menekuni kajian ini adalah Burton Clark (1962) yang menulis buku berjudul *Educating The Expert Society*, sehingga dia dikenal sebagai perintis teori *Technological Functionalism* di dalam Sosiologi Pendidikan. Ada lagi seperti Thurow C. Lester dengan buku *Education and Economic Equality* (Ace Suryadi dan Tilaar, 1993: 19). Pada tahun 1961, tokoh yang dikenal dengan teori sumberdaya manusia Theodore Schultz juga menulis buku berjudul *Investment in Human Capital*, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut sampai sekarang dengan satu keyakinan bahwa pendidikan memiliki andil yang cukup besar dalam upaya pembangunan sebuah bangsa.

Berkenaan dengan manfaat sumberdaya manusia yang dihasilkan pendidikan dalam pembangunan bangsa, ada empat perspektif mengenai hal ini. Menurut Vidhyandika (dalam Moeljanto, 1996: 26-27), empat perspektif tersebut adalah: Fungsional, Liberal, Sosial-demokratis, dan Marxis.

Perspektif Fungsional. Perspektif ini berpendapat bahwa pendidikan sebagai komponen utama pembangunan sumberdaya manusia harus berfungsi sebagai wacana untuk mewariskan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dengan serangkaian aturan yang dituntut masyarakat. Melalui pendidikan individu-individu akan mendapatkan banyak pengetahuan dan ketrampilan untuk hidup di masyarakat yang makin kompleks. Menurut perspektif ini, kualitas manusia "diprogram" melalui pendidikan untuk dapat menyesuaikan (konformitas) dengan logika masyarakat industri dan tuntutan pasar. Untuk konteks Indonesia sekarang ini, dikenal dengan program "*Link and Match*".

Perspektif Liberal. Bagi kaum liberal seperti John Dewey, pembangunan sumberdaya manusia dianggap lebih dari sekedar mendorong konformitas individu dengan tata nilai yang ada, akan tetapi harus mendorong individu untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia melalui pengembangan talenta fisik, emosi, spirit, dan intelektualnya. Individu harus belajar melalui pengalamannya, dan tidak semata-mata melalui apa yang dikatakan kepadanya. Sehingga individu ini berkembang atas dasar potensi dan dunianya sendiri.

Perspektif Sosial-Demokratis. Kaum sosial-demokratis yang tergabung dalam perspektif ini melihat peranan pembangunan sumberdaya manusia dalam mewujudkan persamaan dan keadilan sosial. Menurutnya

pendidikan harus bisa menciptakan persamaan dan keadilan sosial atau dengan kata lain pendidikan harus bisa mengurangi kesenjangan antarkelompok masyarakat yang ada. Karenanya, apabila pendidikan gagal dalam mewujudkan *equality of opportunity*, maka hal itu akan berarti juga kegagalan dalam mengembangkan potensi industri masyarakat secara merata.

Perspektif Marxis. Perspektif ini menekankan pada kritik atas masyarakat kapitalistik yang dinilai tidak manusiawi. Penganut perspektif ini melihat bahwa di dalam masyarakat kapitalis pembangunan sumberdaya manusia merupakan proses reproduksi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menguasai faktor produksi. Lulusan pendidikan umumnya masuk pada teknostruktur menjadi tenaga kerja pasif dan taat (*obedient*), yang menerima struktur kekuasaan tanpa protes. Hal ini disebabkan karena kurikulum pendidikan telah didesain dengan menyimpan fungsi-fungsi tersebut secara tersembunyi. Karena itu pembangunan sumberdaya manusia menurut kaum Marxis hendaknya jangan melestarikan dan melegitimasi kesenjangan sosial yang ada, tetapi sebaliknya harus bisa membangun tatanan masyarakat yang lebih humanis.

Nampaknya keempat perspektif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung konteks sosial-budaya masyarakat yang ingin mengadopsi. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kebijakan dan pelaksanaan pendidikan selama ini telah mendasarkan diri pada keempat perspektif ini secara kritis dan selektif? Kalau ya, bagaimana kita melakukannya secara sungguh-sungguh dan konsisten. Di sinilah agaknya kita dituntut untuk bisa menentukan pilihan-pilihan secara kritis agar tidak terjebak pada kebijakan semu (*silent policy*) yang terkesan jalan di tempat.

Sumberdaya Manusia Unggul

Dalam rangka memacu akselerasi pembangunan menuju kesiapan di era pasar bebas, sumberdaya manusia yang unggul-kompetitif sudah pasti sangat dibutuhkan. Sumberdaya manusia unggul dalam konteks luas dipahami sebagai manusia yang memiliki keunggulan dibanding manusia lain dalam bidang keahlian tertentu. Tentu saja keunggulan yang dimaksud tidak saja yang bersifat fisik semata tetapi juga yang nirfisik.

Sumberdaya manusia unggul ini bisa dilihat pada dua faktor yang dimiliki, yaitu: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang melekat dalam diri manusia unggul tersebut, seperti (a) kualitas pribadi (keuletan, ketangguhan, kemandirian, dan ketekunan), (b) kualitas penguasaan iptek, serta (c) kualitas moral dan keimanan. Sedangkan faktor eksternal lebih berkaitan dengan ekspresi dan kinerja atas potensi yang dimilikinya yang ditunjukkan lewat: (a) produktivitas kerja, (b)

disiplin kerja, (c) kemampuan korespondensi dan kerja kolektif, serta (d) kemampuan menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat.

Sumberdaya manusia unggul menurut terminologi GBHN disebut "*manusia Indonesia seutuhnya*", yakni manusia yang berkembang secara selaras, serasi, dan seimbang antara jasmaniah dan rohaniannya. Dalam bahasa agama istilah ini dikenal dengan "*Insan Kamil*". Konsep-konsep ini berbeda dengan konsep *manusia super (superman)* yang berkembang di Barat. Hal ini karena konsep Barat lebih didasarkan pada filsafat Individualisme yang sangat mendewakan individu "*an sich*", yakni individu yang tereduksi dari dimensi religiusitasnya; sedang konsep yang kita miliki ini mensyaratkan juga kepemilikan moral dan keimanan serta kohesivitasnya terhadap orang lain dan lingkungannya.

Kebutuhan akan Pendidikan Unggul

Sekolah unggul (*excellent*) sebagai salah satu bentuk pendidikan unggul yang ada di tingkat menengah sekarang ini, keberadaannya semakin banyak disorot, karena masyarakat dewasa ini telah menaruh harapan besar terhadap lembaga tersebut. Lebih-lebih ketika banyak kalangan dan pengamat pendidikan mulai mempertanyakan mutu rata-rata lembaga pendidikan yang ada sekarang ini yang masih belum menggembirakan. Terutama menyangkut relevansi antara keluaran pendidikan sekolah terhadap kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang masih rendah, serta potret kebelumsiapan sebagian besar lembaga pendidikan tersebut dalam menyediakan sumberdaya bangsa untuk menghadapi persaingan regional tahun 2003 dan persaingan global tahun 2020.

Banyak ahli menyadari bahwa sekolah-sekolah yang ada sekarang (konvensional) telah mengalami suatu kondisi yang oleh Christopher J. Hurn disebut sebagai "mediokritas pendidikan" (Suyata, 1995: 8). Dalam pandangan yang lebih kritis, sekolah-sekolah kita sekarang telah mengalami berbagai problem internal yang menyebabkan kesulitan bagi sekolah itu sendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu di antara problem-problem internal tersebut adalah, sekolah-sekolah konvensional yang ada telah mengidap suatu kondisi *stagnasi* terutama dalam menyajikan kurikulum yang lebih "*segar*" kepada peserta *diri*. Karenanya kegiatan belajar-mengajarnya telah kehilangan bobot yang menyenangkan di hati peserta didik.

Lembaga-lembaga pendidikan konvensional yang ada, kebanyakan hanya memperhatikan dan memberikan perlakuan rata-rata kelas tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik antarpeserta didik, baik dalam hal kecakapan, minat, maupun bakatnya. Apalagi kelas-kelas yang ada di sekolah sekarang telah didesain menjadi sedemikian massal, sehingga

peserta didik yang kemampuannya di bawah dan di atas rata-rata merasa kurang diuntungkan bahkan dirugikan.

Peserta didik yang kemampuannya di bawah rata-rata dalam perkembangannya semakin terpuruk, karena di samping mereka harus mengejar dengan keras ketinggalan pelajaran yang disajikan oleh guru dengan standar kemampuan rata-rata kelas, juga mereka harus ditambah dengan beban psikologis di hadapan kawan-kawannya. Hal inilah yang disebut dengan istilah beban ganda (*double burden*). Sedang peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sebagaimana disinyalir dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sepertiga dari jumlah mereka yang digolongkan unggul mengalami gejala "*underachievement*" (Murdiyatomoko, 1994).

Salah satu penyebab dari hal di atas adalah proses pembelajaran yang dibangun di sekolah konvensional ini kurang memberikan tantangan kepada mereka untuk bisa menunjukkan kemampuannya secara optimal. Karena itu, kurikulum harus didesain secara segar sehingga menggairahkan bagi peserta didik untuk bisa lebih tertantang. Dengan demikian kebutuhan mendesak yang dibutuhkan sekarang adalah perlunya pendidikan unggul bagi masyarakat. Namun pertanyaan yang muncul adalah, keunggulan yang bagaimana?

Kalau kita mengacu pada kebijakan Depdikbud dalam Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul (1993), dikatakan bahwa sekolah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikan. Untuk mencapai itu maka masukan (*input*), proses pembelajaran, guru, tenaga kependidikan, serta sarana penunjang lainnya diarahkan untuk tujuan tersebut. Dengan bahasa yang lebih lugas, sekolah unggul adalah sekolah yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik secara agregatif menjadi unggul, tidak saja pada dimensi akademik semata tetapi juga pada pertumbuhan optimal kreativitasnya. Karena itu, segala hal yang mendukung ke arah itu seperti: guru, PBM, sarana prasarana, manajemen serta layanan kependidikannya dan lain-lain harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya secara proporsional.

Hal tersebut agaknya memiliki kekaburan ketika dihadapkan pada konteks riil. Praktek-praktek pendidikan secara fenomenal khususnya di sekolah-sekolah yang disebut unggul tadi ternyata menampakkan potret pendangkalan akan makna konsep dan ukuran keunggulan sekolah. Pertama, telah terjadi pemutarbalikan bahwa keunggulan sekolah tidak diartikan dengan keunggulan output yang dihasilkan sekolah, tetapi lebih pada inputnya. Di kalangan masyarakat terdapat anggapan bahwa sekolah unggul adalah sekolah yang rata-rata prestasi akademik atau NEM calon murid yang masuk, tergolong tinggi. Sehingga sudah menjadi tradisi bahwa sekolah-sekolah yang diserbu oleh calon murid yang ber-NEM tinggi

dianggap sekolah unggul, tanpa melihat kinerja sekolah tersebut dalam meningkatkan secara lebih optimal agregatif kemampuan murid-muridnya.

Adalah wajar jika keluaran SMU tertentu memperoleh NEM tinggi, dikarenakan sejak semula murid yang masuk ke SMU tersebut sudah berbekal NEM tinggi dari SLTP. Tetapi bila ada SMU yang berhasil meningkatkan capaian lulusannya dengan NEM tinggi dengan berbekal NEM pas-pasan saat masuk SMU itu, masyarakat belum mengapresiasi secara proporsional. Karena itu penilaian atas keunggulan sekolah hendaknya diberikan secara adil.

Kedua, sekolah unggul sebenarnya ditandai antara lain dengan adanya proses pembelajaran yang berbobot dengan kandungan materi yang mendalam. Tetapi yang nampak justru para peserta didik "dijejali" dengan aneka ragam materi kurikulum yang sesungguhnya sangat memberatkan. Akibatnya, jadwal kurikulum belajar peserta didik di sekolah tersusun secara padat, pagi sampai sore hari; yang pada gilirannya keadaan ini menyebabkan mereka menjadi kurang ada waktu yang tersisa untuk berekspresi dan berimajinasi secara leluasa.

Kejanggalan ketiga, penghargaan di sekolah-sekolah saat ini termasuk sekolah unggul, lebih melihat pada prestasi akademik semata dan NEM telah dijadikan instrümen baku sebagai prestasi tunggal; sementara aspek kreativitas menjadi tenggelam dan tidak mendapat tempat. Memang sekolah-sekolah unggul yang ada telah menyediakan segenap sarana prasarana untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik di luar akademik; tetapi apakah segenap hal tersebut telah dirancang sesuai dengan kebutuhan? Apakah bukan sekedar untuk menciptakan keadaan "eksklusif" terhadap sekolah-sekolah lain?

Beberapa kejanggalan ini nampaknya akan berkembang menjadi kultur yang bersifat massif manakala pemerintah kurang merespon dengan mengembangkan kebijakan sekolah unggul tersebut lebih operasional dan jelas serta mensosialisasikannya secara lebih luas dan sungguh-sungguh. Mengingat masyarakat kita sekarang ini masih belum sepenuhnya memahami seluk beluk dan hakekat pendidikan unggul beserta kriteria keunggulan yang sebenarnya. Bersamaan dengan itu, nampaknya perlu disusul dengan kebijakan-kebijakan baru mengenai sekolah unggul yang tidak hanya untuk tingkat menengah saja, akan tetapi juga untuk tingkat dasar maupun perguruan tinggi.

Penutup

Dari paparan tersebut di atas pada akhirnya dapat ditarik benang merahnya, bahwa kebutuhan akan sumberdaya manusia yang unggul-kompetitif bagi bangsa Indonesia adalah prasyarat mutlak agar bisa menjadi *the winner* di era perdagangan bebas. Keunggulan sumberdaya manusia ini

pada gilirannya akan menjadi pilar utama atas keunggulan bangsa dalam hal kualitas dan kuantitas segala produk bangsa Indonesia baik ekonomi, budaya, maupun iptek.

Kebutuhan akan sumberdaya manusia unggul ini pada hakekatnya perlu direspon secara kreatif dengan cara membangun model pendidikan unggul sehingga mampu menghasilkan lulusan unggul pula. Kaitannya dengan kebutuhan akan pembangunan, pendidikan unggul ini akan bisa menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat memacu akselerasi pembangunan bangsa lebih cepat. Dalam konteks inilah akhirnya muncul empat perspektif berkenaan dengan pendidikan dan kebutuhan pembangunan. (1) Perspektif Fungsional, (2) Perspektif Liberal, (3) Perspektif Sosial-demokratis, dan (4) Perspektif Marxis. Dari keempat perspektif ini kita dituntut untuk menentukan pilihan secara kritis dan kreatif, baik dalam menentukan maupun menerapkan model kebijakan agar lebih rasional dan konsisten, sehingga tidak terjebak pada regulasi kebijakan yang terkesan inovatif (jalan di tempat).

Akhirnya, penulis menyarankan, bahwa mengingat beban pembangunan bangsa dan tuntutan masa depan yang begitu berat, kiranya perlu ada konsistensi kebijakan yang betul-betul rasional dan jelas. Sebagaimana ditunjukkan dengan kebijakan pendidikan unggul, khususnya sekolah unggul yang ada masih dirasa belum jelas dan operasional sehingga dalam implementasi di lapangan banyak mengalami distorsi pemaknaan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ace Suryadi dan HAR Tilaar. 1933. **Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Budiiono. 1992. **Pengaruh Pergeseran Struktural terhadap Pendidikan dan Ketenagakerjaan dalam Periode Tinggal Landas**. Termuat dalam buku: *Transformasi Struktural dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan dan Ketenagakerjaan*, Monograf 1. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1993. **Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Unggul**. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1996. **Pembangunan: Dilema dan Tantangan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Noeng Muhadjir. 1995. **Problematika Pendidikan Menghadapi tantangan Tahun 2020**. Makalah pada Seminar HIPIS Cabang Yogyakarta di UGM tanggal 24 Oktober 1995.
- Suyata. 1995. **Optimalisasi Efektivitas Sekolah melalui Pemetaan Sosio-Akademik dan Penerapannya di SD Kabupaten Dati II Sleman Yogyakarta (Penelitian Tindakan)**. Laporan Penelitian Tahun 1995.
- Wisnuhardhana. 1996. **Pendidikan Indonesia: Mendayung di antara Dua Karang Kepentingan**. Yogyakarta: Balairung UGM, Edisi Khusus Jurnal Th-X.